

Drs. E. Syarifudin

PENDIDIKAN HUBUNGANNYA DENGAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Pendidikan dewasa ini cenderung untuk mengarah kepada pasar kerja, sehingga orang tua setiap menyekolahkan anak-anaknya tidak terlepas dari perkembangan pendidikan kepada pasar kerja, artinya setiap anak sekolah diharapkan oleh orang tuanya setelah lulus segera mendapatkan suatu pekerjaan. Bukankah hal tersebut di atas kita dapat menemukan suatu pendidikan berhasil atau tidak. Kesan yang terkandung dalam pendidikan seakan-akan diterjemahkan dengan kata-kata pengelolaan pendidikan sebagai berikut; bagaimanakah caranya supaya anak dapat masuk dalam lembaga pendidikan dengan mudah, belajar dengan mudah keluar dengan mudah, masuk lagi dalam lembaga pendidikan yang lebih atas dengan mudah, demikian seterusnya. Sehingga akhirnya memasuki lembaga-lembaga sosial ekonomi dengan mudah pula.

Sekiranya kriterial pengelolaan pendidikan seperti tersebut di atas itu dapat dijalankan dan dipenuhi, maka pasti harapan orang tua maupun sebagai warga negara akan merasa senang dan puas adanya, bahkan orang tua akan bahagia bahwa putra-putrinya ti-

dak akan kececeran dalam meniti jembatan pendidikan yang terbentang di antara rumah di satu pihak dan lembaga-lembaga sosial ekonomi di pihak lain. Orang tua ternyata mempunyai filsafat pendidikan yang dalam, meletakkan pendidikan secara fungsional bagi hari depan bangsa.

Akan tetapi, marilah kita bertanya, apakah keinginan orang tua itu dapat terpenuhi? Apakah kesulitannya, dimanakah mereka tercecce, apa sebab mereka tergelincir dari titian sekolah? Siapakah yang membuat titian pendidikan itu sulit dilalui, titian manakah yang selalu membahayakan atau marilah kita bertanya secara fundamental lagi; masih betulkah anggapan bahwa pendidikan itu titian yang fungsional bagi pembangunan bangsa.

B. Masalah

Judul tersebut di atas memberikan suatu pandangan bahwa yang tampaknya sesuatu itu didasarkan kepada pengamatan atas kondisi pendidikan pada dewasa ini. Di satu pihak agaknya terasa oleh kita bahwa adanya cita-cita, pesan dan pandangan bahwa pendidikan harus fungsional bagi pembangunan bangsa. Di pihak lain terasa

adanya kenyataan yang berbeda yaitu mula-mula pada waktu dulu setelah seseorang atau siswa itu lulus dari sesi perpeloncoan kebudayaan dengan cara terhormat maka ia diterima masuk menjadi anggota masyarakat penuh ia tergolong kepada perkumpulan orang dewasa. Namun setelah bentuk pendidikan seperti sekolah datang (berdiri), maka setelah tamat sekolah atau lulus, siswa yang telah lulus itu dapat segera ditempatkan untuk bekerja. Akan tetapi setelah bentuk pendidikan model sekolah tambah meluas, maka setelah tamat para lulusannya menunggu dulu sampai ada lowongan pekerjaan, delapan bulan atau dua tahun (Widodo, 1979: 27). Lama-lama memasuki bentuk pendidikan model sekolah sama sekali bukan jaminan pasti untuk dapat bekerja. Akhirnya setelah tamat pendidikan model sekolah, para lulusannya masuk sekolah lagi, dari pada "nganggur".

Jika menggunakan kriteria seperti tersebut dalam pendahuluan uraian ini, maka kondisi demikian tentunya tidak sehat, dan bila dilihat dari gambaran itu pada arus murid secara agregat, hal tersebut sangat memprihatinkan. Apalagi masalah-masalah itu semua dan mengkaitkannya dengan potensi produktifitasnya atau dengan kata lain untuk memperbincangkan masalah pengembangan sumber daya manusia.

C. Kekuatan Normatif Sistem Pendidikan

Cita-cita untuk masuk sekolah, dan diferensiasi pekerjaan di dalam masyarakat yang sangat luas, kemudian menciptakan sistem pendidikan yang berseluk-beluk. Karena sekolah itu diperlukan, maka sistemnya pun berbalik memiliki kekuatan normatif yang sangat berpengaruh bagi kehidupan anggota masyarakat.

Munculnya kebudayaan sekolah dalam kehidupan bagi bangsa Indonesia, maka ada anggapan bahwa bersekolah itu baik, tidak bersekolah itu buruk. Bersekolah itu disamakan dengan berpendidikan, terpelajar, berprilaku baik (beradab). Namun sebaliknya tidak bersekolah disamakan dengan tidak berpendidikan, tidak terpelajar, tidak berprilaku baik/tidak beradab. Bersekolah itu pintar, tidak bersekolah adalah bodoh. Indikasi-indikasi lainnya yang bernilai positif ialah naik kelas, angka rapot tinggi, tidak putus sekolah, mengikatkan diri untuk belajar. Sebaliknya indikasi-indikasi berikut ini bernilai negatif; tidak naik kelas, angka rapot rendah, tidak lulus, tidak mengikatkan diri untuk belajar.

Akan tetapi, cita-cita untuk bersekolah, disamping berlaku sebagai nilai yang normatif, juga tidak mudah mewujudkannya. Tidak sedikit hambatan yang dialami oleh siswa untuk memenuhinya. Tidak selalu mudah bagi seorang anak untuk sekolah. Hambatan yang menghadang di hadapannya terlampau banyak, sejak ia mulai berdiri di pintu gerbang untuk

masuk kemudian sesudah ia ada di dalam kelas, dan lebih-lebih pada akhirnya jika ia akan menamatkan pendidikan. Siklus yang berat ini akan diulang oleh siswa tersebut dua sampai lima kali. Jika siswa itu ingin sukses dalam memasuki jenjang-jenjang pendidikan, maka ia harus memiliki ketahanan. Juga orang tuanya sebagai sponsornya harus memiliki ketahanan. Ketahanan yang dituntutnya itu ialah psikologis karena sekolah memerlukan ketekunan mental, baik bagi diri siswa mau pun bagi orang tua yang harus mendukungnya. Finansial karena harus memiliki persediaan biaya pendidikan yang cukup. Sosial karena anak/siswa dan orang tua harus menciptakan suasana dan iklim keluarga yang mendorong keinginan untuk belajar.

Jika daya dukungnya lemah, maka lebih banyak anak/siswa akan meninggalkan sekolah karena putus di jalan, baik sebelum lulus maupun sesudah lulus dari suatu jenjang pendidikan.

Sementara itu tampak sistem persekolahan yang dianggap baik, yaitu sistem persekolahan yang dapat menerima siswa dalam jumlah yang besar pada permulaannya. Para siswa itu sendiri memiliki usia yang sama oleh karena itu dianggap memiliki persamaan dalam kemampuan psikologisnya. Akan tetapi, sistem persekolahan yang baik itu pula seperti berharap bahwa pada akhir pelajaran nanti, sekolah itu dapat menunjukkan seleksi yang telah dilakukannya dalam berbagai bentuk yaitu menjadi kecilnya

jumlah lulusan, bervariasinya angka-angka hasil lulusan. Kalau pada saat penerimaan, dipakai asas penerimaan kualitas sehingga proses belajar itu mengandung aspek yang lain, yaitu memilah-milah, mengklasifikasikan, mensortir, menyeleksi yang berkualitas dari pada yang tidak berkualitas. Ada anak/siswa yang meneruskan dan ada anak/siswa yang tidak meneruskan, ada anak yang sukses dan ada anak yang tidak sukses, ada yang tidak putus se-kolah dan ada yang putus sekolah.

Kekuatan sekolah untuk mensortir dan menyeleksi anak itu diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan jika ada sekolah yang mengkonsolidasikan sistem seleksi yang lebih ketat maka sekolah seperti itu sering dipuji dan mendapat nama sebagai se-kolah yang baik.

Dengan sistem pendidikan yang berseluk beluk dan sangat berstruktur itu, maka secara normatif diterima pula pengaruhnya yang menstrukturkan klasifikasi kelompok-kelompok masyarakat. Yang tidak bersekolah dibedakan dengan yang bersekolah. Di antara yang bersekolah berbeda pula status mereka yang hanya lulus sekolah dasar (SD) dan yang lulus sekolah menengah (SLTP), demikian seterusnya, semakin tinggi seseorang menamatkan sekolah, semakin tinggi pula status sosialnya sebagai anggota masyarakat. Perubahan-perubahan status karena kenaikan jenjang pendidikan dalam masyarakat diperkuat

dengan seremoni yang bersifat publik, misalnya upacara penyampaian ijazah, upacara penyampaian gelar dan syukuran karena lulus ujian. Dengan cara seperti itu masyarakat sekelilingnya diberi tahu bahwa setelah terjadi perubahan status sosial seseorang, sebagai akibat suksesnya di dalam sekolah.

D. Struktur pada Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi

Taraf pendidikan yang sangat sulit untuk diintervensi ialah kedudukan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Hal itu bisa dimengerti karena kedudukan sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama, pada akhirnya dapat dipandang sebagai pendidikan umum yang sekarang sudah dimiliki oleh setiap warga negara. Karena kenyataan bahwa anak-anak yang berumur 15-16 tahun bagi kebanyakan negara dipandang belum memenuhi syarat untuk memasuki dunia kerja, hal ini menjadi salah satu faktor diberlakukannya pendidikan umum 9 tahun.

Mutu pendidikan umum 9 tahun sangat perlu dipertinggi agar negara ini memiliki warga negara yang sungguh kuat basis pengetahuannya.

Akan tetapi, pada tingkat sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi, strukturnya harus lebih ditingkatkan lagi mutunya, karena pada taraf pendidikan inilah yang sesungguhnya mempunyai arti yang penting bagi terbentuknya stuktur kemasyarakatan.

Apabila pendidikan 9 tahun dipandang sebagai basis kewarganegaraan, maka pendidikan menengah dan perguruan tinggi dapat dipandang sebagai basis bagi pengembangan stuktur persiapan tenaga kerja. Hal ini mengandung beberapa arti sebagai berikut: Pertama, memasuki pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi harus didasarkan kepada seleksi yang lebih baik karena mereka itulah yang menjadi tumpuan luas stuktur pekerjaan yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Itu berarti bahwa kelompok kerja terampil dari berbagai pekerjaan, sebagian besar terdiri dari mereka yang lulus dari sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Keterampilan yang lebih rendah dari itu, misalnya pada tingkat dasar, biarlah dibentuk oleh dunia industri sendiri melalui latihan di dalam pekerjaan, atau oleh masyarakat melalui bentuk-bentuk non formal. Kedua bentuk latihan yang lebih fungsional dan relatif lebih murah karena dikaitkan langsung dengan fasilitas pekerjaan. Pemerintah dapat memberikan dorongan dan bantuan fasilitas atas bentuk-bentuk latihan seperti itu, tanpa harus menciptakan suatu sitem pendidikan atau latihan kejuruan khusus yang tersendiri.

Kebutuhan akan tenaga kerja di bawah terampil ini akan diambil dari mereka yang telah lulus dari pendidikan minimal yang berlangsung 9 tahun, yaitu mereka yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya pada

pendidikan tingkat menengah atas.

Namun pendidikan tinggi ini belum memberikan suatu jaminan sepenuhnya memperoleh pekerjaan yang pasti, seperti yang dikemukakan oleh Iskandar Agung diantaranya bahwa pendidikan tinggi dan industri ibarat sekeping mata uang logam yang sisi-sisinya berbeda, tetapi saling membutuhkan satu sama lain. Antara keduanya memerlukan jalinan hubungan yang serasi, saling menunjang dan saling menguntungkan.

Namun sejauh ini terdapat indikasi kesenjangan antara keduanya. Kedua pihak terkesan saling terlepas dan tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Sektor industri seolah-olah kurang membutuhkan jasa pendidikan tinggi, dan sebaliknya pendidikan tinggi menutup diri, seakan-akan kurang terkait dengan kegiatan sektor industri, padahal berbagai kebutuhan mendesak dialami oleh sektor industri dan pendidikan tinggi. Dari segi kehidupan dunia industri, kebutuhan peningkatan teknologi dan mutu produk merupakan yang perlu segera dipecahkan, sebaliknya pendidikan tinggi amat memerlukan dana untuk memperbesar keotonomian dan menuju lembaga yang swadana (Iskandar Agung, 1991:55).

E. Membuka Situasi Pasaran Kerja

Dengan meningkatnya pertumbuhan industri dan perusahaan, tentu

dibutuhkan tenaga kerja baru, dalam berbagai jenis dan tarafnya. Tenaga kerja ini dicari oleh para industriawan dan pengusaha dalam pasaran kerja. Mereka masing-masing membawa kriterianya supaya mereka dapat membeli tenaga kerja yang nantinya memang menguntungkan. Di samping pengetahuan dan keterampilan, ada syarat-syarat yang bukan kognitif yang sangat diperiuken oleh mereka. Misalnya kejujuran, disiplin tepat waktu, dapat dipercaya, tekun, hal-hal yang pada umumnya justru tidak diberikan di sekolah. Syarat-syarat ini sangat diperlukan oleh para pengusaha karena hanya dengan syarat-syarat itu dapat diperoleh jaminan yang lebih pasti bahwa para pekerja itu nanti tidak akan membawa kerugian. Syarat-syarat yang bukan kognitif itu sesungguhnya juga merupakan suatu barang dagangan yang sebenarnya mahal.

Sistem persyaratan itu acapkali tidak begitu jelas bagi para pengusaha kalau mereka diminta untuk merumuskan secara eksplisit, akan tetapi bagi mereka untuk dirinya sendiri, sistem persyaratan itu sangat jelas. Bahkan perusahaan itu dapat menempelkan label harga pada berbagai taraf dan jenis tenaga kerja yang memiliki berbagai persyaratan itu, baik yang kognitif maupun yang bukan kognitif.

Situasi seperti ini juga memberi pengaruh kepada pasaran kerja, begitu bermacam-macam, sangat tidak seragam, tidak beraturan, karena itu sebenarnya tidak pernah jelas, juga ti-

dak begitu terlihat, apakah para pengusaha itu menawarkan pekerjaan atau menawarkan gaji. Apakah ada konsistensi antara jenis pekerjaan dan jumlah gaji yang terdapat di dalam pasaran kerja. Ringkasnya gambaran tentang jenis pekerjaan dan jumlahnya, persyaratannya baik yang kognitif maupun yang bukan kognitif itu sentiasa tidak jelas. Dan situasi yang kabur dari kondisi pasaran kerja ini mempengaruhi kondisi penawaran jasa pendidikan dan latihan.

F. Kurang Meratanya Tenaga Kerja yang Terampil

Distribusi tenaga kerja yang terampil sampai saat ini masih belum merata, hal ini masih terlihat di wilayah Indonesia bagian Timur, untuk tenaga kerja yang terampil dan profesional walaupun tersedia, lapangan kerja yang cukup luas, tetapi mereka cenderung untuk mencari ke daerah lain (Depnaker; 1994:39).

Bahkan menurut Baroto Sardadi, dalam rangka pengembangan Daerah, yang sangat penting adalah bagaimana untuk melatih masyarakat untuk bisa memasuki lapangan kerja, disamping masalah kualitas tenaga kerja, penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja sektor dan daerah. Begitu pula tantangan di bidang ketenagakerjaan yang dihadapi adalah masalah pengangguran dan setengah pengangguran dan perlindungan tenaga kerja.

Beliau menambahkan bahwa se-

lama periode Repelita VI diperkirakan pertambahan angkatan kerja sebanyak 11 juta, sehingga jumlah angkatan kerja pada akhir pelita VI (1998) menjadi 92,3 juta orang, sedangkan pertambahan kesempatan kerja yang tercipta dalam kurun yang sama sebesar 10,2 juta atau pada akhir pelita VI menjadi 88,9 juta orang. Maka dari itu angkatan kerja yang masih menganggur masih besar jumlahnya yaitu mencapai 3,4 juta atau selama periode tersebut bertambah 0,8 juta orang. Sementara jumlah setengah penganggur bertambah 4,1 juta selama repelita VI (Baroto Sardadi, 1994:39).

G. Kesimpulan

Masalah ketidaksesuaian antara struktur dan sistem Pendidikan disatu pihak dengan ketenagakerjaan di pihak yang lain, yang menjadi uraian ini penulis ingin menanggapi dan mencari jalan penyelesaian agar setiap permasalahan dapat diatasi dengan cara; Peninjauan kembali struktur pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, peninjauan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dengan diberlakukannya pendidikan dasar 9 tahun bagi warga negara untuk menjamin agar kualitas umumnya sebagai warga negara bertambah kuat. Sehingga sekolah ini menjadi sumber tenaga terampil jika lulusannya tidak melanjutkan.
2. Sekolah Menengah Umum (SMU)

adalah menjadi pembentuk tenaga teknis atau sebagai tenaga kerja yang terlatih dan akan memperoleh keterampilan pada lembaga-lembaga latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Latihan Kerja Keterampilan (LKK) atau oleh pihak swasta yang mempunyai suatu perusahaan dan tempat pelatihan.

3. Begitu pula Perguruan Tinggi (PT) hendaknya harus lebih mampu untuk meningkatkan lulusannya sehingga mampu memiliki sumber daya yang diinginkan oleh setiap pasar kerja (instansi yang membutuhkan).

Selanjutnya spektrum Pendidikan Profesional hendaknya diperlebar dan diperluas pada tingkat perguruan tinggi, karena dunia industri akan menumpahkan harapannya dari pendidikan tinggi, mengingat dunia perguruan tinggi merupakan calon pemimpin yang profesional dan juga merupakan calon cendekiawan atau sebagai pemrakarsa sains dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarjiman, *Peningkatan Pendidikan Kejuruan Melalui Pembinaan Jiwa Wiraswasta dalam analisis pendidikan* Dep. P & K, Th. 1980
- Tjipto Sasmito, Waskito, "Mandat Masyarakat Yang Dijalankan Oleh Sistem Sekolah", *Prisma*, V No. 2, Maret 1976.
- Tjipto Sasmito, Waskito, "Pendidikan dan Struktural Okupasi", *Jurnal Penelitian Sosial*, No.3 Tahun 1976.
- Tjipto Sasmito, Waskito, "Pendidikan dan Kerja", *Pendidikan*, Dep. P & K, No. 1 Tahun 1977.
- Tjipto Sasmito, Waskito, "Peningkatan Mutu Pendidikan", *Analisis Pendidikan*, Dep. P & K No. 2 Tahun 1980.
- Widodo CM dan Konta Damanik, *Pengalaman Kerja Lulusan Sekolah*, Hasil Laporan mengenai lulusan SD, SMP dan SMA, Jakarta BP3K, 1979.